

**PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PENGAWASAN PRAKTIK
MANDIRI KEPERAWATAN DI KABUPATEN KUDUS
JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
*Konsentrasi Hukum Kesehatan***



Oleh :

Nama : Mustain

NIM : 04.93.0017

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN

PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PENGAWASAN PRAKTIK

MANDIRI KEPERAWATAN DI KABUPATEN KUDUS

JAWA TENGAH



Pembimbing :

1. Endang Wahyati, SH, MH. Tanggal
2. dr Gatot Suharto, Sp.F.M.Kes Tanggal

ABSTRACT

The roles of nursing professional organization in nursing practice supervision are: 1). To carry out and develop nursing service, nursing education, and science, 2). To compose the standard of nursing education, the standard of nursing service and practice, making recognition/legislation effort in conducting nursing practice. Viewed from legal aspect, the roles of nursing professional organization (PPNI) can be divided into two; first, imperative role, which is a compulsory role carrying standard nursing practice composition and certificate regulation in form of the establishment of practice licence (SIP). Second, less imperative role (non-compulsory role), carries a role in nursing service quality development.

The objective of this study is to obtain the overview of the roles of professional organization in applying independent nursing practice supervision in the Regency of Kudus, Central Java. The legal approach used in this study is *socio-legal juridical* approach. The respondents of this study are the committee and members of PPNI Kudus.

From the result of this study, it can be found that the roles of PPNI, which are still weak, in regulating nurses' independent practice in Kudus are influenced by several factors, such as: 1). Observed from the Professional Organization (PPNI): the powerless effort of profession on the side of government's bureaucracy, which can be seen from the absence of laws regulating the model of independent nursing practice realization. 2). Observed from the members of nursing profession, they are still unaware of law awareness in practicing independent nursing. This can be seen from the form of practice performed today, which is, to practise as doctors. Nurses do not have enough will and are not able yet to perform independent nursing practice. 3) Observed from the community, they still consider that nurses are able to perform as doctors, the people where they go for help, and they do not have to go further for doctors. They think that nurses are cheaper, easier, having closer relationship with the community, no practising hours/they can help anytime, and the patients can be healed. 4) Observed from the government, there is no law regulating independent nursing practice yet; the form and the model, independently or in group.

PPNI has not done its function as supervisor optimally, because: 1). There is no condition from PPNI about the form and model of independent nursing practice in the community. 2) There is no condition from PPNI about independent nursing practice regulation, individually or in group. 3). PPNI is still reluctant to regulate the form of nursing practice. Actually, PPNI has known the form and model of nursing practice that has been performed today, which is, as the replacement of doctor, however, it is unable to regulate its members.

Keywords: roles, PPNI organization, independent nursing practice

ABSTRAK

Peran organisasi profesi keperawatan dalam pengawasan praktik keperawatan adalah 1). Pembinaan dan pengembangan pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan keperawatan dan iptek, 2). Menyusun standar pendidikan keperawatan, standar pelayanan dan praktik keperawatan, mengusahakan pengakuan/legislasi dalam pelaksanaan praktik keperawatan. Dilihat dari aspek hukum, peran organisasi profesi perawat (PPNI) dibedakan dalam dua peran, pertama peran imperatif, yaitu peran wajib yang didalamnya adalah memuat peran penyusunan standar praktik keperawatan, pengaturan sertifikasi dalam bentuk penetapan surat ijin praktik (SIP). Sedangkan peran fakultatif (peran tidak wajib) memuat peran dalam pengembangan mutu pelayanan keperawatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memperoleh gambaran tentang Peran Organisasi Profesi dalam pengawasan Penerapan Praktik Mandiri Keperawatan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Pendekatan hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis (*socio-legal approach*). Responden penelitian ini adalah pengurus dan anggota PPNI kabupaten Kudus.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih lemahnya peran PPNI dalam pengaturan praktik mandiri perawat dikabupaten Kudus, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1) Ditinjau dari Organisasi Profesi (PPNI), lemahnya perjuangan profesi dalam sisi birokrasi pemerintah, hal ini dapat dilihat belum adanya undang-undang yang mengatur tentang realisasi model praktik mandiri keperawatan. 2). Ditinjau dari anggota, masih rendahnya kesadaran dari anggota profesi perawat, tentang kesadaran hukum untuk melakukan praktik mandiri keperawatan, hal tampak dengan bentuk praktik yang dilakukan saat ini adalah praktik sebagai dokter. Perawat belum mau, belum mampu untuk melakukan praktik mandiri keperawatan. 3).Ditinjau dari Masyarakat, masih menganggap perawat adalah mampu bertindak sebagai dokter, tempat mereka meminta pertolongan, dan tidak harus jauh-jauh ke tempat praktik dokter. Mereka beranggapan perawat lebih murah, mudah, hubungan masyarakat lebih dekat, tidak ada jam praktik/sewaktu-waktu bisa melayani, dan sembuh. 4).Dintinjau dari Pemerintah, belum ada aturan hukum, yang mengatur tentang praktik mandiri keperawatan, bentuk dan modelnya, secara mandiri dan berkelompok.

PPNI belum melakukan fungsi pengawasan secara optimal, karena :1). Tidak ada ketentuan dari PPNI tentang bentuk dan model praktik mandiri keperawatan di masyarakat. 2). Tidak ada ketentuan dari PPNI tentang penertiban praktik mandiri keperawatan secara individu maupun kelompok 3).PPNI masih setengah hati untuk menertibkan bentuk praktik perawat. PPNI sebenarnya telah mengetahui tentang bentuk dan model praktik keperawatan yang dilakukan saat ini, yaitu sebagai pengganti dokter, namun tidak mampu untuk menertibkan anggotanya.

Kata Kunci : Peran, Organisasi PPNI, Praktik Mandiri Keperawatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, dimana tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di UNIKA Soegipranata.Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini yang berjudul Peran organisasi dalam penerapan praktik mandiri keperawatan di kabupaten kudu Jawa Tengah.jauh dari sempurna dengan demikian saran dan kritik untuk perbaikan sepenuhnya sangat diperlukan.

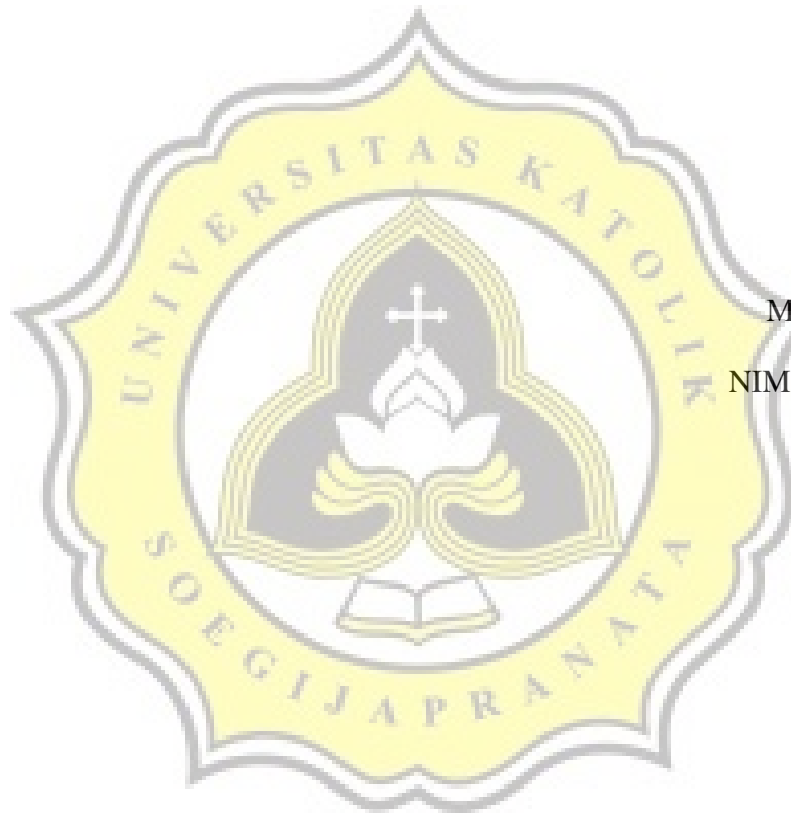
Dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan terima yang tak terhingga kepada :

1. DR. Y. Bagus Wismanto, Msi, selaku Rektor UNIKA Soegija pranata Semarang.
2. Prof Widanti SH CN saelaku direktur progam pasca sarjana Hukum Kesehatan
3. Ibu Endang wahyanti SH MH Selaku pembibing I
4. Bapak dr Gatot suharto SP F. M KES.selaku pembibing II.
5. Bapak Ibu dosen pasca sarjana UNUKA Soegija pranata.
6. Ketua PPNI dan anggotanya diwilayah kudu.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Tesis ini

Mudah – mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum kesehatan khususnya tentang hukum praktik keperawatan.

Semarang, Juli 2007.

Penulis



MUSTAIN

NIM. 04.93.0017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II INTRODUKSI TEORI	10
A. Peran dan Peran Organisasi Perawat	10
B. Praktik Keperawatan	13
C. Peran Pengawasan Praktik Mandiri Perawat oleh Organisasi Profesi .	14
D. Istilah-Istilah Hukum Tentang Praktik Mandiri Perawat	19
E. Ketentuan-Ketentuan Hukum yang terkait Praktik Mandiri Keperawatan.....	20
F. Konstruksi Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Metode Pendekatan	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Definisi Operasional Variabel	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Subyek Penelitian	26
F. Lokasi Penelitian	27
G. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum PPNI Wilayah Kudus.....	29
B. Latar Belakang Sejarah Perawat Melakukan Praktik	30
C. Peran PPNI Dalam Praktik Mandiri Keperawatan di Kabupaten Kudus	35
D. Kesiapan Tenaga Perawat dalam Melaksanakan praktik Mandiri Keperawatan di Kabupaten Kudus	44
E. Peran Pengawasan Praktik Mandiri Keperawatan di Kabupaten Kudus	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN